

Bansos dan Aset Tak Genah?

Sanggau Sandang Predikat WdP

SANGGAU. Hasil audit BPK tahun 2010 lalu. Pemkab Sanggau menyandang peringkat Wajar dengan Pengecualian (WdP). Peringkat WdP tersebut, dipicu karena dua persoalan penting yang masih mengganjal hingga sekarang.

Kedua persoalan itu, terkait dengan penertiban aset daerah dan dana bantuan sosial (Bansos) senilai Rp1,4 miliar pada tahun 2006 lalu. "Sekarang kita buka-bukaan saja. Persoalan mengganjal itu, mengenai penertiban aset daerah dan masalah peninggalan pemerintahan lama. Persoalan Bansos sejumlah R 1,4 miliar di tahun 2006 lalu," paparnya usai menghadiri sidang paripurna pembahasan Ra-

perda LKPJ APBD Sanggau tahun 2010, kemarin.

Dipaparkan Setiman, aset daerah merupakan segala bentuk, berkaitan dengan barang-barang yang dimiliki oleh Pemkab Sanggau. Termasuk diantaranya aset yang bergerak ataupun tidak bergerak. "Permasalahan ini, sudah sekian lama berlangsung, tentunya mesti ditertibkan. Target kita ini harus tuntas. Pertanggungjawaban itu nomor dua, tapi realisasinya itu yang harus diperjelas," tegasnya.

Setiman sempat menyinggung tentang persoalan aset daerah tersebut, seperti kendaraan dinas, yang sudah dibawa oleh pejabat tertentu ke luar Kabupaten Sang-

gau. Dikarenakan yang bersangkutan pindah tugas ke kabupaten lain.

"Nah, persoalan ini, masih akan kita konsultasikan ke BPK. Mana yang boleh 'didump' atau tidak. Saya tak peduli, mereka harus bayar itu, sekalipun Setiman sendiri. Harus patuh dengan aturan yang ada," paparnya.

Dijelaskan Setiman, kalau kendaraan usianya sudah mencapai 8 tahun. Kemudian untuk kepala daerah umur kendaraan itu selama lima tahun. Hal itu, ada ketentuannya. "Siapa pun tidak boleh 'ngedump' kendaraan di bawah lima tahun," timpalnya.

Sedangkan untuk dana Bansos

Rp1,4 M, beber Setiman, merupakan warisan dari pemerintahan yang lama. Kendati demikian Pemkab Sanggau telah membentuk tim, guna untuk menertibkan administrasi.

"Persoalan Bansos ini, sudah saya katakan berulang-ulang. Kita gunakan system jemput bola. Sekarang tim sedang bekerja," cetusnya. Diakui Setiman, terdapat beberapa bantuan yang disinyalir tidak tertib administrasi, diantaranya bantuan untuk tempat ibadah.

"Objeknya masih ada, malahan panitianya masih ada. Kalau dulu dikasih bantuan, hanya cukup dengan bukti kuitansi saja. Tapi

sekarang kita lebih ketat lagi, termasuk pula untuk bantuan kepada partai politik. Ketua dan bendahara yang menerima. Jelas kita akan meminta pertanggungjawaban mereka," tuturnya.

Kendati demikian Setiman, tidak berani mengatakan persoalan itu sudah final. Namun, akan berusaha untuk menuntaskannya. "Kita tetap bekerja. Saya tidak mengatakan sudah final. Kalau demikian, bisa-bisa saya yang di hukum," tukasnya.

Intinya, tegas Setiman, untuk kedua persoalan itu. Pemkab Sanggau akan komit dan konsen untuk menuntaskannya. "Kita komit untuk menuntaskan persoalan ini," tegasnya. (SrY)